

**Politik Dinasti dalam Pemberitaan Media
(Analisis Framing Isu Politik Dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah
Pada Harian Kompas dan Koran Tempo)**

***Dynastic Politics in Media Coverage
(Framing Analysis on Dynastic Politics of Banten Provincial Governor,
Ratu Atut Chosiyah, on Kompas and Tempo Newspaper)***

Budiyono

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta
Badan Litbang SDM- Kemkominfo RI
Jl. Imogiri Barat Km.5 Yogyakarta

masbudism@yahoo.co.id

Naskah diterima: 30 November 2016, direvisi: 29 Desember 2016, disetujui: 30 Desember 2016

Abstrak

Penelitian berjudul Politik Dinasti Dalam Pemberitaan Media, mengangkat persoalan bagaimana media massa mengkonstruksi realitas Isu Politik Dinasti di pemerintahan provinsi Banten, dan dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Isu Politik Dinasti tersebut dikonstruksi oleh media massa dan pola pembentukan konstruksi realitas yang digunakan oleh media. Penelitian jenis Discourse Analysis ini menggunakan metode analisis framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa Harian Kompas mengkonstruksi realitas isu Politik Dinasti Ratu Atut di Provinsi Banten di dasarkan pada penempatan teks pemberitaannya melalui pengutipan sumber-sumber berita yang relevan, melalui judul utama (headline), lead berita dalam bentuk piramida terbalik. Sementara Koran Tempo mengkonstruksi isu Politik Dinasti lebih kental lagi sebagai sesuatu yang luar biasa dan penting direspon oleh semua pihak untuk melihat bagaimana prospek ke depannya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: analisis framing, isu politik, realitas politik, politik dinasti dan konstruksi media

Abstract

This study investigates how mass media construct dynastic politics issue in Banten Provincial Government, and with what way the construction is formed. The objective is to discover the mass media's construction of dynastic politics issue and the pattern of reality construction applied by media. This discourse analysis uses framing analysis method by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosiecki. The results indicate that Kompas daily constructs the issue of Ratu Atut Dynastic Politics in Banten Province based on the placement of texts through citation from relevant news sources, in headline and news lead in the form of an inverted pyramid. Tempo newspaper frames this issue as extraordinary and important to gain public response concerning the future of Indonesian democracy.

Keywords: *Framing Analysis, Political Issue, Reality of Politics, Dynastic Politics and Media Construction*

PENDAHULUAN

Isu politik dinasti dalam jaringan pemerintahan di Indonesia tampak terus menjadi fenomena yang menarik. Hal tersebut dikarenakan dalam realitanya ada kecenderungan di banyak kepala daerah berupaya membangun politik dinasti untuk mendukung kinerjanya. Setelah melewati sepuluh tahun demokrasi Indonesia berjalan, ternyata demokrasi di Indonesia mengalami ujian dengan munculnya fenomena *political dynasty*. Fenomena ini terlihat dengan merujuk data Kemendagri, yang mengungkapkan terdapatnya 57 kepala daerah yang sedang membangun politik dinasti (Kompas: 18 Maret 2013). Seringkali media massa mengangkat dalam pemberitaan sebagai wacana politik dinasti ketika ada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yang kemudian terus diikuti perkembangan wacana pro dan kontra atas keberadaannya dalam sistem pemerintahan.

Perkembangan politik dinasti tampak dimulai dengan munculnya *clientilism* dalam pencalonan anggota legislatif dan pencalonan kepala daerah, dan isu yang belakangan muncul adalah *clientilism* dalam suksesi kepemimpinan nasional. Sementara itu di tingkat politik lokal, di Provinsi Kepulauan Riau misalnya, kemunculan Maya Suryanti anak Walikota Suryatati A Manan dalam bursa Calon Walikota Tanjungpinang dan Aida Ismeth dalam pemilukada Kepulauan Riau Tahun 2010 yang lalu adalah bukti fenomena *political dynasty*. Di daerah lain seperti Provinsi Banten misalnya, jejak-jeaknya lebih kentara. Ratu Atut Choisyah Gubernur Banten 2007-2012 misalnya, keluarga besarnya memiliki setidaknya 9 orang yang memimpin di masing masing "kerajaannya". Seperti dirinya sendiri yang memimpin Banten, suami menjadi anggota DPR, anak menjadi anggota DPD, menantu menjadi anggota DPRD Kota Serang, adik menjadi

anggota DPRD Banten, Adik tiri mejadi wakil wali kota Serang, ibu tiri menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Ibu tirinya yang satu lagi menjadi anggota DPRD kota Serang, dan adik iparnya Airin menjadi WalikotaTangerang Selatan. (Alim Bathoro, 2011}. Menurut Agustino (2010), di tingkat politik lokal di Indonesia masih ditawan oleh pengaruh *local strongmen* dan *roving bandits* sehingga walaupun telah berlaku transformasi politik lebih satu dekade, demokrasi di tingkat lokal masih terpenjara oleh kepentingan elit politik lokal. Kondisi demikian sedikit banyak akan memengaruhi tingkat partisipasi politik yang melemah. Hal ini seperti diungkan oleh Soebagio (2009), yang menyatakan bahwa penurunan partisipasi politik dari tahun ke tahun di masa reformasi, salah satunya disebabkan kuatnya pengaruh elit politik di parlemen. Dengan itu kebijakan yang dilahirkan, lebih mengedepankan kepentingan elit politik daripada kepentingan masyarakat (Soebagio, 2009, dalam Alim Bathoro, 2011).

Politik dinasti di Banten yang akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan dan layak di angkat ke permukaan oleh media, lantaran adanya kondisi yang perlu dikritisi. Tersiarinya potensi jaringan kekerabatan dari keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah masuk dalam pemerintahan di Banten, dan berkembangnya isu permainan proyek pembangunan di dominasi perusahaan yang dimiliki kerabatnya menjadikan fungsi kontrol terhadap jalannya roda pembangunan di provinsi Banten tidak berjalan maksimal.

Sebuah pemberitaan mengungkap-kan bahwa menurut laporan Bank Indonesia, Banten mengalami pertumbuhan ekonomi pesat. Pada triwulan II-2013, pertumbuhan mencapai 5,66 persen atau mendekati pertumbuhan nasional 5,81 persen. Sementara di bagian lain ada pemberitaan yang mengisahkan masih terjadinya kemiskinan di Banten. Provinsi dengan jumlah penduduk 12

juta jiwa yang tersebar di delapan kabupaten/kota, tercatat punya nilai ekspor 9,48 miliar dollar AS tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) Banten juga mencatat, produk domestik regional bruto Banten naik dari tahun ke tahun. Ini berarti pendapatan rata-rata penduduk membaik. Namun, kemiskinan justru meningkat. Jika per Maret 2012 jumlah orang miskin di Banten 652.766 jiwa, pada Maret 2013 jumlahnya menjadi 656.243 jiwa. Angka pengangguran juga masih tinggi, hingga Februari lalu, jumlah penganggur 552.895 jiwa atau 10,10 persen dari angkatan kerja sebanyak 4,9 juta jiwa. Ironinya, angkatan kerja di Banten sebagian besar hanya berpendidikan SD. (<http://regional.kompas.com/2013/10/22/>).

Keadaan seperti tergambar di atas menjadi unsur penguat adanya indikasi manajemen pengelolaan pemerintahan kurang mendukung pengembangan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi sangat ironi. Kondisi kontradiksi demikian yang mengundang media merasa berkepentingan mengungkap adanya kekuatan politik dinasti dalam pemerintahan, yang banyak mengelola anggaran pemerintah dalam proyek pembangunan (melalui perusahaannya) tetapi kesejahteraan masyarakatnya masih saja terbengkelai. Hal tersebut karena implementasi model politik dinasti, dalam perspektif komunikasi politik dapat dipandang sebagai Pisau bermata dua, tergantung bagaimana media mengemas informasi pemberitaannya.

Untuk kepentingan ini, politik media dalam komunikasinya tentu akan menggunakan *framing* untuk mengarahkan pemberitaan sesuai dengan apa yang akan dikonstruksikan oleh wartawan. Disinilah bahasa memegang peran penting dalam menentukan format narasi (dan makna) tertentu dalam pemberitaan. Seperti dikemukakan Y Ukhaerunisa, 2012, dari perspektif ini, bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi bahkan menciptakan realitas. (Y Ukhaerunisa, 2012)

Itu sebabnya peneliti memandang isu politik dinasti, merupakan fenomena yang perlu di apresiasi oleh berbagai kalangan untuk pembahasan prospek kedepannya, dan media menjadi sarana konstruksi dan publikasi guna terbangunnya opini public dan pembahasan publik atas fenomena tersebut sehingga memunculkan gambaran solusi yang diharapkan semua pihak.

Permasalahannya adalah bagaimana media massa mengonstruksi realitas Isu Politik Dinasti di pemerintahan provinsi Banten, dan dengan cara apa Konstruksi itu dibentuk. Adapun tujuan penelitian adalah untuk melihat atau mengetahui Isu Politik Dinasti tersebut dikonstruksi oleh media massa dan pola pembentukan konstruksi realitas yang digunakan oleh media. Sementara manfaat penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana media massa (dalam hal ini Harian Kompas dan Koran Tempo) mengonstruksi peristiwa Politik Dinasti terhadap perkembangan politik lokal dan demokratisasi di Pemerintahan Provinsi Banten, menjadi realitas media.

Objek penelitian ini ialah berita menyangkut Politik Dinasti Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, di Harian Kompas dan Koran Tempo. Ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan dua media tersebut, yaitu: *pertama*, Koran Tempo dan Harian Kompas merupakan media pemberitaan yang bersifat nasional. Media tersebut memiliki komunitas pembaca yang sangat luas baik dari aspek keluasan wilayah maupun segmentasi audiensnya. *Kedua*, Koran Tempo dan Harian Kompas merupakan media pemberitaan “berbahasa terbaik.” (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/> Akses, 17-10-2013). *Ketiga*, dua media tersebut mendukung tereksposnya fenomena politik dinasti dalam pemberitaan media.

Dari aspek teoritik, teori yang membahas hubungan antara media dengan realitas sosial adalah *teori konstruksi sosial* atas realitas yang dikembangkan Adony dan Maney. Teori ini memusatkan perhatian kepada proses pembentukan realitas. Inti

teorinya adalah *bagaimana realitas dibentuk oleh individu dan bagaimana individu menginternalisasi realitas yang disajikan media*.

Teori lainnya adalah Agenda Setting dari Maxwell MCKOM Mbs. dan Donald Show. Asumsi dasar dari teori ini adalah bagaimana media membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Dengan teknik pemilihan dan penonjolan, media memberikan *cues* tentang isu yang lebih penting. Singkatnya, apa yang dianggap penting oleh media, akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Dan apa yang dilupakan oleh media, akan luput juga dari perhatian masyarakat. (Rakhmat, 1995: 68)

Konstruksi Realitas oleh Media Massa

Memahami mengenai konstruksi realitas media, menurut Ibnu Hamad dalam bukunya "Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa" tentang proses konstruksi realitas, prinsipnya bahwa setiap upaya "menceritakan" (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tidak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik dalam usaha mengkonstruksi realitas. (Hamad, 2004: 11-13). Dalam menceritakan fenomena untuk konsumsi publik, media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian seluruh isi media tidak lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna.

Penempatan Bahasa dalam Mengkonstruksi Realitas

Surat kabar adalah salah satu media massa yang banyak memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk dapat menyampaikan informasi dengan jelas kepada pembaca, surat kabar sudah semestinya menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan bahasa yang digunakan biasanya diorientasikan sesuai dengan target pembacanya.

Dalam konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama, ia merupakan instrumen pokok dalam menceritakan realitas. Berger, Peter dan Thomas Luckman (dalam Ibnu Hamad, 2004) meyakini bahwa bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Dalam komunikasi politik penggunaan bahasa menentukan format narasi (dan makna) tertentu. Sementara menurut Fiske (1990) dalam *Cultural and Communication Studies*, menambahkan bahwa penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari perspektif ini, bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi bahkan menciptakan realitas. (Y Ukhaerunisa, 2012)

Dari uraian tersebut, media telah menjadi *sumber informasi* yang dominan tidak saja bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dalam memperoleh gambaran realitas mengenai suatu peristiwa. Menurut Shoemaker dan Reese (1996: 33-37) disebutkan ada dua konsep dalam melihat realitas yang direfleksikan oleh media. *Pertama, konsep media secara aktif* yang memandang media sebagai partisipan yang turut mengkonstruksi pesan sehingga muncul pandangan bahwa tidak ada realitas sesungguhnya dalam media. *Kedua, konsep media secara pasif* yang memandang media hanya sebagai saluran yang menyalurkan pesan-pesan sesungguhnya, dalam hal ini media berfungsi sebagai sarana yang netral, media menampilkan suatu realitas apa adanya.

Dalam konteks ini, konsep media secara aktif menjadi relevan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini juga **sesuai dengan paradigma konstruksionis** yang digunakan. Paradigma tersebut memandang bahwa media dilihat bukan sebagai saluran yang bebas nilai atau netral, melainkan sebagai subyek yang mengkonstruksi realitas, dimana para pekerja yang

terlibat dalam memproduksi pesan juga menyertakan pandangan, bias dan pemihakannya. Berdasarkan hal tersebut, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita. (Eryanto, 2004:17).

Bagi Pan dan Kosicki, *framing* pada dasarnya melibatkan kedua konsepsi itu. Dalam media, *framing* dipahami sebagai perangkat kognisi yang digunakan dalam informasi untuk membuat kode, menafsirkan, dan menyimpannya untuk dikomunikasikan dengan khalayak yang kesemuanya dihubungkan dengan konvensi, rutinitas, dan praktik kerja profesional wartawan. *Framing* lalu dimaknai sebagai suatu strategi atau cara wartawan dalam mengkonstruksi dan memproses peristiwa untuk disajikan kepada khalayak. (Eriyanto, 2005: 253)

METODE

Jenis penelitian ini adalah *Discourse Analysis*, dengan metode analisis *framing* dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pertimbangan pemilihan metode tersebut bahwa *framing* menurut Pan dan Kosicki sebagai suatu proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Dalam pendekatan Pan dan Kosicki, perangkat *framing* dapat dibagi ke dalam empat struktur besar, yaitu sebagai berikut.

Pertama, struktur sintaksis, yaitu berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan umum berita (*lead* yang dipakai, *latar*, *headline*, kutipan yang diambil dan sebagainya).

Kedua, struktur skrip, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan

atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita dan bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita.

Ketiga, struktur tematik. Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil.

Keempat, struktur retorik berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca. (Sumber: Nugroho, Bimo., et al, 1999: 30)

Framing lalu dimaknai sebagai suatu strategi atau cara wartawan dalam mengkonstruksi dan memproses peristiwa ke dalam berita untuk disajikan kepada khalayak. (Pan dan Kosicki, dalam Eriyanto, 2005: 253)

Teknik Pengumpulan Data. Satuan analisis dalam penelitian ini adalah teks berita tentang isu politik dinasti di pemerintahan Banten sebagai dampak pemberitaan seputar opini tentang dinasti gubernur Banten (Ratu Atut Chosiyah) yang dimuat di harian KOMPAS dan KORAN TEMPO, edisi bulan Oktober tahun 2013.

Teknik analisis data. Dari data pemberitaan yang dihimpun berdasarkan pembagian struktur framing varian Pan dan Kosicki ke dalam empat struktur besar (sintaksis, skrip, tematik, dan retorik), kemudian diinterpretasikan berdasarkan paradigma konstruksionis yang mengacu atau memanfaatkan teori Somaker dan Rese juga *agenda setting*, maka dicari suatu "benang merah" dari hasil penafsiran-penafsiran tersebut.

Deskripsi Media Dan Pemberitaannya Harian Kompas

Harian *Kompas*, terbit mulai, 28 Juni 1965, merupakan surat kabar nasional yang menjangkau semua provinsi dan isinya mencakup peristiwa berskala nasional untuk bisa memenuhi perannya sebagai Amanat Hati Nurani Rakyat. Kini Kompas terbit lebih dari 530.000 eksemplar tiap hari dan beredar di seluruh wilayah Indonesia melalui teknologi cetak jarak jauh.

Harian *Kompas* berkantor pusat di Jakarta Palmerah Selatan No.26-28 Jakarta Kodepos 10270 Indonesia, diterbitkan oleh *PT Kompas Media Nusantara* yang merupakan bagian dari Kelompok *Kompas Gramedia (KG)*. Untuk memudahkan akses bagi pembaca di seluruh dunia, *Kompas* juga terbit dalam bentuk daring bernama *kompas.com* yang dikelola oleh *PT Kompas Cyber Media*. Harian *Kompas* dipimpin oleh redaktur kepala Rikard Bagun, diformat, Lembar lebar 7 kolom, berhaluan netral. (<http://kiosk.kompas.com/SubscriptionV10/> Akses, 27-10-2013)

Koran Tempo

Koran Tempo hadir di hadapan pembaca, sejak terbit pertama kali pada 2 April 2001, banyak hal telah diungkap untuk memenuhi tuntutan pembaca akan berita yang lebih cerdas dan berkualitas. Dengan halaman enam kolom, Koran Tempo menghadirkan berita yang ringkas tanpa kehilangan kedalamannya. Koran Tempo tetap menyajikan berita-berita investigatif, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penghargaan: pada 2002 memperoleh penghargaan sebagai koran paling kredibel dari Dewan Pers. Penghargaan dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, sebagai koran berbahasa Indonesia terbaik selama empat tahun berturut-turut, mulai 2007 hingga 2010. Berfokus pada pemberitaan politik dan ekonomi. Banyak kasus menarik yang diangkat, seperti sepanjang 2010, yang paling menghebohkan kasus penyelamatan *Bank Century*. Kasus ini menyita perhatian banyak

kalangan karena melibatkan dua tokoh penting: Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penulisannya berimbang (<http://korporat.tempo.co/produk/2/koran-tempo>, Akses, 6-11-2013).

Kompas dan *Koran Tempo* merupakan dua surat kabar harian yang sangat intens melakukan pemberitaan terkait dengan isu politik dinasti di provinsi Banten. Munculnya isu Politik Dinasti Ratu Atut dalam pemberitaan media tersebut, berawal dari penangkapan dan penetapan adik kandung (gubernur Banten) Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan melakukan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (kini nonaktif) Akil Mochtar, terkait sengketa Pilkada Lebak yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, berita-berita berlabel Politik dinasti Ratu Atut terus bertebaran di media massa. Dalam pemberitaannya, diungkap adanya relasi kekuasaan yang mendominasi perilaku politik dan ekonomi menjadi *icon* pemberitaan yang dapat membuai pembacanya. Kepiawian dua media tersebut tampak memiliki kemauan keras agar publik pembaca ikut menyelami peristiwa politik dinasti yang dikembangkan pemerintahan Gubernur Ratu Atut Chosiyah beserta kerabatnya di lingkungan wilayah pemerintahan Banten dan efeknya bagi kehidupan demokrasi politik dan ekonomi bagi masyarakat Banten. Bahwa ada gejala tereduksinya nilai-nilai demokratisasi politik dan terbaikannya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, cukup jelas tergambar dalam pemberitaan itu.

Pada banyak pembahasan, dijumpai ragam solusi untuk meruntuhkan dinasti politik kepala daerah. Salah satunya pada RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam RUU Pilkadaanya melarang kerabat kepala daerah untuk mencalonkan diri sebelum melalui jeda satu periode jabatan (5 tahun) sejak kerabatnya

menjadi kepala daerah. Ketentuan tersebut dituangkan pada Pasal 12 Ayat (1) Huruf P yang berbunyi: "Tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan."

Apabila dicermati lebih intens, solusi yang ditawarkan Pemerintah adalah inkonstitusional, hal tersebut karena bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Bahwa Negara memberikan perlakuan yang sama dalam pemerintahan untuk setiap WNI, dalam hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Adanya Pasal 12 Ayat (1) Huruf P tersebut, akan mencederai hak konstitusional kerabat para Gubernur karena menghalang-halangi hak mereka untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberitaan media massa yang menungkap isu Politik Dinasti di lingkup pemerintahan, telah menuai berbagai opini publik yang pro dan kontra. Disatu sisi, karena belum ada aturan mainnya yang membatasi keberadaannya, maka opini menyatakan sah-sah saja adanya politik dinasti dalam jaringan pemerintah-an. Sementara di sisi yang lain, ber-pandangan bahwa pengembangan politik dinasti dalam jaringan pemerintahan dapat mengurangi nilai demokratisasi dan menutup akses bagi warga masyarakat yang lain terhadap sumberdaya pemerintan, maka opini yang muncul, perlu ada aturan main dalam regulasi untuk membatasi politik dinasti agar tidak merusak tatanan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menyuburkan fenomena KKN yang tidak terkendali.

Berikut ini akan disajikan peristiwa Politik Dinasti di Pemprov Banten yang dibingkai oleh dua media harian Kompas dan Koran Tempo sesuai dengan fram

masing-masing berdasar *Framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

A. Framing Harian Kompas

Merespon munculnya fenomena isu Politik Dinasti di Pemprov Banten, harian KOMPAS mengangkat fenomena harapan politik masyarakat terhadap pengkritisan fenomena politik Dinasti Gubernur Atut di Prov Banten dalam pemberitaannya. Seperti Kompas, edisi Rabu, tanggal, 16 Oktober 2013, halaman 2, kolom, 1-4, dengan frame: Judul Utama: **Politik Dinasti Rawan**

Judul kedua (sub judulnya): Demokrat dan Golkar Merasa Tak Ada Peraturan yang Dilanggar

Lead berita: *"Politik dinasti makin menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di Indonesia, praktik politik dinasti yang merupakan anomaly dalam demokrasi dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara penuh hingga lepas dari kendali."*

Kutipan Sumber-1: "Politik dinasti membuat demokrasi kehilangan daya tarik dimata public," kata pengajar sosiologi Univ Gajah Mada, Arie Sudjito, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/10).

Kutipan Sumber-2: Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakri, mengatakan: Keluarga Atut dipilih sesuai dengan aturan yang ada, jika mau dirubah, aturannya harus dirubah.

Kutipan Sumber-3: Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengingatkan, meskipun konstitusi ataupun undang-undang tidak melarang orang yang memiliki hubungan kekerabatan menduduki jabatan di daerah, ada batasan norma kepatutan.

Menurut presiden, berbahaya jika kekuasaan politik dan kekuatan bisnis menyatu di daerah (Kompas, 12/10)

Ketua Harian Partai Demokrat, Sjarifudin Hasan menyatakan, pencalonan sejumlah kerabat Yudhoyono itu tidak menjadi masalah karena telah

memenuhi batas kepatutan yang diadopsi partai Demokrat. “pertama, dia memiliki kemampuan atau kualitas. Kedua, harus dibatasi. Di partai Demokrat, misalnya, dibatasi tidak boleh lebih dari dua dalam satu keluarga inti.”

DPR dan Pemerintah

Pimpinan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) Komisi II DPR, Arif Wibowo, menyatakan, semua fraksi di DPR sepakat mencegah adanya praktik politik dinasti. Namun, mereka belum sepakat dengan model pencegahan yang diusulkan pemerintah karena dapat berarti mengebiri hak politik warga Negara.

Untuk mencegah politik dinasti, dalam Pasal 12 Huruf (p) RUU Pilkada yang disusun pemerintah disebutkan, calon Gubernur tidak boleh memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan

Gubernur dan Bupati/Walikota, kecuali ada selang waktu minimal satu tahun.

Sementara dalam Pasal 70 Huruf (p) disebutkan, calon Bupati tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan Gubernur dan Bupati/Walikota, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Pimpinan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) Komisi II DPR, Arif Wibowo: “Kami mengusulkan jalan tengah, antara mencegah politik dinasti yang cenderung menyeleweng dan jaminan terhadap hak politik warga Negara, misalnya dengan memperberat syarat pencalonan agar tidak muncul calon karbitan dari keluarga kepala daerah. Kepala daerah juga harus mundur jika ada kerabanya ikut pilkada,” ungkap Arif. (Kompas, 16 Oktober 2013, hal.2/Kolom 2-5)

Frame Harian Kompas: Adanya Realitas isu Dinasti Politik Gubernur Atut di Banten	
Elemen	Strategi Penulisan
Skematis	Frame menunjukkan pandangan harian Kompas tentang adanya <i>Politik Dinasti Dalam Pemerintahan Provinsi Banten</i> yang bisa merusak tatanan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan seperti itu terlihat pada judul-judul berita, bentuk leed, strategi pengemasan teks-teks beritanya dan substansi isi pemberitaannya.
Skematis	Pengutipan sumber-sumber berita yang relevan yang menyatakan adanya keterkaitan penempatan pimpinan politik pemerintahan berbasis hubungan darah dan perkawinan dengan upaya membangun dinasti politik, setidaknya dengan mengangkat pemberitaan seputar isu dinasti politik Gubernur Atut, ditempatkan pada posisi headline, latar, dan lead berita dengan model piramida terbalik. Seperti pada pemberitaan Kompas, tanggal, 16 Oktober 2013 yang berjudul (1): Politik Dinasti Rawan ; (2) sub judulnya: Demokrat dan Golkar Merasa Tak Ada Peraturan yang Dilanggar. Kutipan Sumber-1: Pengajar sosiologi Univ Gajah Mada, Arie Sudjito; Kutipan Sumber-2: Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakri; Kutipan Sumber-3: Presiden Susilo Bambang Yodhoyono; Kutipan Sumber-4: Pimpinan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) Komisi II DPR, Arif Wibowo. Dst.
Skrip	Framing harian Kompas yang memaknai adanya dukungan terhadap upaya pembenahan Regulasi sebagai antisipasi Politik Dinasti, melalui ungkapan yang mengisahkan “Politik dinasti makin menyuburkan praktik KKN. Di Indonesia, praktik politik dinasti yang merupakan anomaly dalam demokrasi dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara penuh hingga lepas dari control (Kompas, 16 Okt 2013) “Politik dinasti membuat demokrasi kehilangan daya tarik dimata public” (Skrip). Kompas dalam Judul “Politik Dinasti Rawan”, menulis kalimat berita “pimpinan

Frame Harian Kompas: Adanya Realitas isu Dinasti Politik Gubernur Atut di Banten	
Elemen	Strategi Penulisan
	Panitia Kerja RUU Pilkada, Komisi II DPR, Arif Wibowo , menyatakan, semua fraksi di DPR sepakat mencegah adanya praktik Politik dinasti, namun mereka belum sepakat dengan model pencegahan yang diusulkan pemerintah karena dapat berarti mengebiri hak politik warga Negara. (Kompas, 16-10-2013)
Tematik	<p>Elemen tematik yang ditampilkan harian Kompas adalah adanya koherensi yang tampak pada beberapa kalimat yang menghubungkan setiap alinea pada berita yang ditampilkan, terutama dengan pengutipan statemen orang-orang yang diasumsikan relevan untuk dimuat, yaitu:</p> <p>Kutipan statemen -1: "Politik dinasti membuat demokrasi kehilangan daya tarik dimata public," kata pengajar sosiologi Univ Gajah Mada, Arie Sudjito, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/10).</p> <p>Kutipan statemen -2: Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakri, mengatakan: Keluarga Atut dipilih sesuai dengan aturan yang ada, jika mau dirubah, aturannya harus dirubah.</p> <p>Kutipan statemen -3: Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengingatkan, meskipun konstitusi ataupun undang-undang tidak melarang orang yang memiliki hubungan kekerabatan menduduki jabatan di daerah, ada batasan norma kepatutan.</p> <p>Kutipan statemen -4: semua fraksi di DPR sepakat mencegah adanya praktik Politik dinasti, namun mereka belum sepakat dengan model pencegahan yang diusulkan pemerintah karena dapat berarti mengebiri hak politik warga Negara. (Kompas, 16-10-2013)</p>
Retoris	<p>Harian ini telah melakukan pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk memframe isu Adanya Realitas isu Dinasti Politik Gubernur Atut di Banten dan dampaknya, seperti pada kalimat "Politik dinasti membuat demokrasi <i>kehilangan daya tarik</i> dimata public," (Statemen pengajar sosiologi Univ Gajah Mada, Arie Sudjito). Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakri, mengatakan: "Keluarga Atut dipilih sesuai dengan aturan yang ada, <i>jika mau dirubah, aturannya harus dirubah.</i>" Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengingatkan, meskipun konstitusi ataupun undang-undang tidak melarang orang yang memiliki hubungan kekerabatan menduduki jabatan di daerah, <i>ada batasan norma kepatutan.</i>"</p> <p>Demikian juga dari sisi Grafis penekanan terhadap berita tentang isu tersebut melalui penggunaan huruf kapital dengan ukuran besar dan hitam dan cetak tebal (bold) seperti Politik Dinasti Rawan (Kompas, 16 Oktober 2013) sehingga tampak penonjolannya dan menimbulkan daya tarik bagi khalayak pembaca.</p>

B. Framing harian Koran Tempo

Senada dengan harian Kompas, demikian pun *Koran Tempo* memaknai isu adanya keterkaitan antara Politik Dinasti Keluarga Besar Atut dalam Pemerintahan Provinsi Banten sebagai suatu fenomena politik yang menjadi pengganjal berlangsungnya demokratisasi dalam proses pemilihan politik yang fair bagi semua warga Banten yang akan menggunakan hak-hak politiknya, sehingga menjadi peristiwa politik yang penting untuk dikaji prospek solusinya.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penekanan pemberitaan yang mengin-

dikasikan adanya upaya untuk melanggengkan kekuasaan pemerintahan tetap dipegang oleh jaringan kekerabatan dari keluarga besar Atut yang saat ini menjabat Gubernur Banten. Peluang ini diperkuat oleh statemen-statemen kelompok kepentingan yang setengahnya mendukung eksistensi pemerintahan dinasti dengan menyatakan bahwa "tidak ada peraturan perundangan yang secara tegas melarangnya," sehingga secara konstitusional berlangsungnya politik

dinasti dalam system pemerintahan sah-sah saja.

Meski demikian, *Koran Tempo* pun berupaya mengembangkan aspirasi yang menghendaki adanya upaya pengaturan agar politik dinasti tidak berkembang lebih besar dan mempengaruhi kinerja pemerintah untuk tidak mengabaikan kepentingan

rakyat. Hal demikian dapat diatasi jika ada peraturan perundangan yang mengaturnya secara yuridis formal, harapan ini barangkali bisa terwujud jika RUU Pilkada yang akan membatasi adanya politik dinasti telah selesai dibahas Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI.

Frame : Adanya Realitas Isu Dinasti Politik Gubernur Ratu Atut di Banten	
Elemen	Strategi Penulisan
Skematis	Pengutipan sumber-sumber berita yang relevan yang menyatakan adanya keterkaitan penempatan pimpinan politik pemerintahan berbasis hubungan darah dan perkawinan dengan upaya membangun dinasti politik, setidaknya dengan mengangkat pemberitaan seputar isu dinasti politik Gubernur Atut, ditempatkan pada posisi headline, latar, dan lead berita dengan model piramida terbalik.
Skrip	Fram Harian Koran Tempo yang memaknai adanya Pro-Kontra terhadap kehidupan politik dinasti dalam system pemerintahan daerah, itu juga diwujudkan dalam bagaimana Harian Koran Tempo mengisahkan peristiwa tersebut (Skrip). Peristiwa yang dikisahkan Koran Tempo adalah dengan pernyataan kalimat beritanya seperti pada berita berjudul: Dinasti Keluarga Atut & Kemiskinan di Banten . Gubernur Banten sekaligus kakak ipar Airin, Ratu Atut Chosiyah (kanan) melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, di Kampus Universitas Terbuka (UT), Tangerang Selatan (April 2011). Menjabatnya Airin diduga sebagai usaha untuk memperkokoh dinasti keluarga Atut di Banten. TEMPO, Selasa, 08 Oktober 2013
Tematik	Elemen tematik yang ditampilkan harian Koran Tempo adalah adanya koherensi yang tampak pada beberapa kalimat yang menghubungkan setiap alinea pada berita yang ditampilkan. Pengutipan statemen sumber berita yang dipandang relevan, missal pada berita Klan Atut Berkuasa di Lima Daerah , Ketua Partai Golkar Fadel Muhammad tak memungkir Ratu Atut Chosiyah sebagai Ketua Golkar di Banten memiliki beban memenangkan kader-kadernya di Banten Atut harus mampu menyiapkan kader dan membuktikan... Koran Tempo, 5-10-2013.
Retoris	Harian ini telah melakukan pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk memframe isu Adanya Realitas Politik Dinasti Gubernur Atut di Banten, seperti pada kalimat dalam judul berita: “Jawara, Ulama, dan Golkar dalam Dinasti Ratu Atut , Tempo, Selasa, 08 Oktober 2013. <i>Ibu tiri</i> Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Heryani (kanan) menjabat sebagai wakil Bupati Pandeglang periode 2011-2016. Heryani merupakan <i>isteri kelima</i> Chasan Sochib, <i>ayah Atut</i> , ini berhasil memenangkan Pilkada Pandeglang ulangan pada Desember 2010 lalu. ANTARA/Asep Fathulrahman. Pada aspek lain menggunakan Grafis untuk penekanan berita tentang isu tersebut melalui penggunaan huruf kapital di setiap katanya dengan ukuran besar dan hitam tebal (bold) sehingga tampak menonjolannya dan menimbulkan daya tarik bagi khalayak pembaca.

Interpretasi

Dari informasi (teks-teks berita) yang telah diuraikan, bahwa media telah menyampaikan berita-berita yang telah mengindikasikan terjadinya hubungan kekerabatan

dari klan Gubernur Ratu Atut Chosiyah dalam jajaran pemerintahan di provinsi Banten. Dalam konteks tersebut terbentuknya citra politik dinasti Gubernur Atut itu merupakan realitas sesungguhnya

atau hanya frame (bingkai) dari media yang jeli memberitakannya tersebut?

Untuk mengetahui hal tersebut, maka setelah dilakukan analisis framing dengan menggunakan varian Pan dan Kosicki dalam bagian ini dilakukan interpretasi atau penafsiran dengan mendasarkan pada pandangan konstruksionis, mengacu pada teori Shoemaker dan Reese serta *agenda setting*, yang hasilnya sebagai berikut.

A. Framing Harian Kompas

Harian *Kompas* memaknai realitas isu Politik Dinasti (Gubernur Banten) Ratu Atut sebagai realitas sesungguhnya. Dari strategi penulisannya, harian ini mengkonstruksi teks tentang isu tersebut melalui pengutipan sumber-sumber berita yang relevan, melalui penempatan judul utama (*headline*), *lead* berita dalam bentuk piramida terbalik. Fram Harian *Kompas* juga memaknai adanya kecenderungan penguatan jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan di lingkup pemerintahan provinsi Banten maupun di wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Dinamika hubungan Kekerabatan terlihat pada Posisi Gubernur dipegang Ratu Atut sementara kerabatnya di posisi sebagai Bupati, wakil Bupati, kepala Dinas dan sebagainya. Semua menunjukkan adanya hubungan kerabat atas dasar Hubungan darah dan ikatan perkawinan.

Dalam pandangan konstruksionis, realitas itu bersifat subyektif. Realitas hadir karena dihadirkan oleh konsep subyektivitas wartawan. Dalam konteks ini, Harian *Kompas* telah menghadirkan fakta atau realitas adalah hasil konstruksi wartawannya, termasuk juga medianya yang menurut pandangan ini adalah agen konstruksi pesan. Artinya, media bukanlah sebagai saluran yang netral, tetapi juga subyek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias dan pemihakannya. Harian *Kompas* memaknai adanya isu Politik Dinasti Ratu Atut tersebut menjadi penting karena menempatkan judul utama, penggunaan label dan jenis huruf yang lebih menonjol

dari berita-berita yang lain sehingga teori *agenda setting* yang direfleksikan redaksinya bahwa isu itu penting.

Dari sudut teori *Shomaker* dan *Reese* yang menyebutkan dua konsep dalam melihat realitas yang direfleksikan media. *Pertama*, konsep media secara aktif yang memandang media sebagai partisipan yang turut mengkonstruksi pesan sehingga muncul pandangan bahwa tidak ada realitas sesungguhnya dalam media. *Kedua*, konsep media secara pasif yang memandang media hanya sebagai saluran yang menyalurkan pesan-pesan sesungguhnya, dalam hal ini media berfungsi sebagai sarana yang netral, media menampilkan suatu realitas apa adanya.

Dalam konteks ini, maka konsep media secara aktif menjadi relevan dalam kaitannya pemaknaan Harian *Kompas* terhadap isu Politik Dinasti Ratu Atut. Hal ini juga sesuai dengan paradigma konstruksionis yang digunakan, yang memandang media dilihat bukan sebagai saluran yang bebas atau netral melainkan sebagai subyek yang turut mengkonstruksi realitas, di mana para pekerja yang terlibat dalam memproduksi pesan juga menyertakan pandangan, bias dan pemihaknya.

B. Framing Harian Koran Tempo

Koran Tempo memaknai isu Politik Dinasti Ratu Atut, juga sama sebagai suatu fenomena yang penting dalam perkembangan politik demokrasi. Dari sisi penempatan berita, teks tentang isu Politik Dinasti Ratu Atut tersebut berada dalam beberapa kolom, artinya memberikan keleluasaan dalam mengungkap substansi materi yang penting diketahui masyarakat. Seperti pada kasus berita tentang **Jawara, Ulama, dan Golkar dalam Dinasti Ratu Atut**, dan **KPK Bongkar Gurita Bisnis Dinasti Atut** dalam mengkonstruksi teks, **Koran Tempo** memberi penonjolan adanya Politik Dinasti Ratu Atut dalam pemberitaan dengan penempatan judul berita yang lebih menonjol Huruf kapital dan cetak tebal, sehingga lebih

menonjol dibanding dengan pemberitaan yang lain.

Pemaknaan Koran Tempo terhadap isu politik dinasti Ratu Atut tersebut telah sesuai dengan pandangan konstruksionis yang mengatakan bahwa realitas adalah hasil konstruksi wartawannya, dalam hal ini redaksi Koran Tempo telah mengonstruksi isu Politik Dinasti dengan mengemas berita tentang terbangunnya hubungan kekerabatan dalam lingkup pemerintahan di Provinsi Banten. Hal ini juga serupa dengan yang diberitakan Harian Kompas yang memaknai isu politik dinasti Ratu Atut menjadi penting dipublikasikan untuk mendapat respon dan pembahasan publik.

Sama halnya dengan Harian Kompas, maka konsep media secara aktif dari Shomaker dan Reese, menjadi relevan dalam kaitannya pemaknaan Koran Tempo terhadap isu Politik Dinasti Ratu Atut. Hal ini juga sesuai dengan paradigma konstruksionis yang digunakan, yang memandang media bukan sebagai saluran yang bebas atau netral melainkan sebagai subyak yang mengkonstruksi realitas. *Koran Tempo* menampilkan *frame* tentang isu Politik Dinasti tersebut sebagai fenomena yang penting dikritisi seperti diharapkan dari pemberitaan pada teks-teks berita yang berisi adanya keterkaitan hubungan kekerabatan dalam system pemerintahan di Provinsi Banten, meski dari berbagai perspektif masih terjadi pro-kontra karena belum ada aturan yang secara tegas melarang adanya hubungan kekeluargaan dalam pemerintahan.

Dengan demikian maka kedua media pemberitaan (Harian Kompas dan Koran Tempo) ini sama-sama memandang fungsi *agenda settingnya* menjadi penting ditonjolkan, karena teks yang disajikan kedua harian tersebut mencakup berbagai pelabelan guna meyakinkan publik pembaca pada potensi dibangunnya politik dinasti keluarga besar Ratu Atut yang sebelumnya merupakan pewarisan dari ayahnya Kasan yang juga

merupakan tokoh penting di pemerintahan di provinsi Banten.

PENUTUP

Harian *Kompas* mengkonstruksi realitas isu Politik Dinasti Ratu Atut di Provinsi Banten di dasarnya pada penempatan teks pemberitaannya melalui pengutipan sumber-sumber berita yang relevan, melalui judul utama (*headline*), *lead* berita dalam bentuk piramida terbalik.

Harian *Kompas* memaknai realitas isu Politik Dinasti Ratu Atut di Provinsi Banten sebagai realitas sesungguhnya, juga memaknai adanya indikasi hubungan antara Penempatan Pimpinan Pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten serta di beberapa lembaga dengan pengembangan Dinasti Politik sebagai upaya membangun Jaringan kerjasama yang bisa menguntungkan kepentingan kerabat.

Koran Tempo ternyata mengonstruksi isu Politik Dinasti lebih kental lagi sebagai sesuatu yang luar biasa dan penting direpson oleh semua pihak untuk melihat bagaimana prospek ke depannya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Dari sisi penempatan berita, teks tentang isu Dinasti Politik Keluarga besar Ratu Atut tersebut berada dalam topik dan judul pemberitaan yang sangat menonjol. *Koran Tempo*, sangat berani dan tegas memblok satu halaman penuh (di halaman paling depan hanya untuk satu pemberitaan berkait dengan Politik Dinasti Banten, Ratu Atut, dengan judul yang sangat mencolok. (Seperti, *Koran Tempo*, edisi tanggal, 14 Oktober 2013, dengan dua judul sekaligus yang saling mendukung. Judul pertama “KPK Bongkar Gurita Bisnis Dinasti Atut”. Judul kedua, “Selingkuh Politik-Bisnis”.

Koran Tempo telah memaknai isu tentang Politik Dinasti Ratu Atut sebagai sesuatu gejala komunikasi politik yang kontroversi, dengan mengemas berita tentang penegasan Gubernur Ratu Atut

bahwa tidak ada Dinasti dalam pemerintahan di Banten..... maju sebagai calon pimpinan daerah secara prosedural memenuhi aturan main yang berlaku, dipilih oleh rakyat.

Terdapat kesamaan dalam hal mengonstruksi teks berita antara *Harian Kompas* dan *Koran Tempo*. Hanya saja *Koran Tempo* tampak lebih berani dan tegas dalam menampilkan persoalan Politik Dinasti. Seperi berani menyediakan 1 halaman penuh, di halaman pertama hanya untuk satu pemberitaan berkait dengan Politik Dinasti Banten, Ratu Atut, dengan judul yang sangat mencolok.

Dalam penggunaan bahasa sebagai strategi komunikasi untuk sosialisasi dan penekanan pesan komunikasi politik terkait eksistensi politik dinasti di lingkup pemerintahan Provinsi Banten, kedua harian *Kompas* dan *Koran Tempo*, cukup baik, mudah dipahami.

Penelitian ini, secara akademis/teoritis, dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori dan metode, terutama komunikasi politik. Penggunaan teori-teori media, yaitu teori *konstruksi realitas* oleh media yang dikemukakan Shoemaker dan Reese (1996). Kemudian, teori efek media (*agenda setting*), ternyata telah memperkaya analisis atau pembahasan interpretasi, yaitu terdapat kesesuaian antara teori dengan cara-cara media mengkonstruksikan suatu peristiwa ke dalam teks pemberitaannya.

Media massa (dalam kasus penelitian ini adalah media massa cetak- surat kabar) dinilai memiliki potensi yang kuat dalam penyebarluasan pesan-pesan politik, melakukan sosialisasi politik, dan membentuk opini publik. Dalam konteks ini, pandangan tersebut menurut hasil penelitian terhadap *Kompas* dan *Koran Tempo* dengan metoda analisis *framing* ternyata benar adanya. Pengembangan realitas kehidupan politik dinasti gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sebagaimana telah dikonstruksi melalui pemberitaan dalam harian *Kompas* dan

Koran Tempo pada edisi Oktober 2013, memahamkan kepada publik pembacanya. Oleh karenanya, kemunculan opini pro dan kontra mengindikasikan secara teoritik, media pun tetap menaruh penghargaan terhadap hak privasi publik untuk beropini sebagai pihak yang memiliki nilai subjektivitas tinggi utamanya dalam merespon pemberitaan oleh kedua media ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, *Memberi Perspektif Pada Ilmu Komunikasi*, dalam Nunung Prajarto, *Komunikasi, Negara dan Masyarakat*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2004.
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Denis Mc.Quail, *Teori Komunikasi Massa, Suatu pengantar*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2005.
- Hamad, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Jakarta: Granit, 2004.
- Kovach, Bill dan Tom Rorosentiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik*, Jakarta: Pantau, 2003.
- Nimo, Dan, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Nugroho, Bimo, Eriyanto, dan Frans Surdiasis, *Politik Media Mengemas Berita*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999.
- Rakhmat, Jalalludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.
- Salim, Agus, (Penyunting), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan*

Penerapannya), Yogya: Tiara Wacana, 2001.

Severin, Werner J – James W. Tankard, Jr., *Teori Komunikasi, Sejarah Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sobur, Alex, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Varma, SP., *Teori Politik Modern*, terjemahan oleh Yohanes Kristiarto SL., dari buku aslinya *Modern Political Theory*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Internet:

Abidin, Fadil, *Praktik Aristokrasi dalam Demokrasi Kita*, 2010, Diakses, 21-10-2011. <http://jurnal-toddoppuli.wordpress.com/2010/11/15/praktik-aristokrasi-dalam-demokrasi-kita/>

Anang Santoso, *Studi Bahasa Kritis, Bahasa, Media Massa, Dan Perspektivitas: Kajian Wacana Kritis*, Sabtu, 08 Mei 2010. Diakses, 27-10-2013 <http://studibahasakritis.blogspot.com/>

Andi Arief, "Dinasti Politik Ada dan Tiada". Wednesday, 16 October 2013 12:08. Diakses, 27-10-2013. http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=303511:andi-arief-tulis-gdinasti-politik-ada-dan-tiadaq.

Alim Bathoro, *Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2, 2011 : 115 – 125, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2011.

Agustino, Leo & Mohammad Agus Yusoff, *Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia : Local Strongmen dan Roving Bandits*, Jurnal Jebat: Malaysian Journal of History, politics & Strategic Studies Volume 37 th 2010, p 86-104, dalam Alim Bathoro, Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2, 2011 : 115 - 125

Herlina, Andrie, *Oligarki Dalam Politik Dinasti, dalam Kabar Indonesia*, 15 Maret 2011. Diakses, 27-10-2013, <http://68.142.243.205/search/srpsache?ej>;

Mustika, *Tradisi Dan Lokalitas*, 2010. Diakses, 21-10-2011. <http://mustika.blog.fisip.uns.ac.id/tag/politik/>

Ibnu Setyo Hastomo, *Antipati Dinasti Politik*, Diakses, 16-10-2013 <http://padang-ekspres.co.id/?id=3399&news=nberita>,

Teguh Dwi Oktovian, *Makalah Bahasa Jurnalistik Dalam Media Massa*, 2012. Diakses, 5-11-2013. [Http://Edukasi.Kompasiana.Com/2012/11/21/Bahasa-Jurnalistik-504908.Html](http://Edukasi.Kompasiana.Com/2012/11/21/Bahasa-Jurnalistik-504908.Html)

Soebagio, *Distorsi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, 2009 (dalam Alim Bathoro, 2011), Jurnal Makara, Sosial Humaniora Vol 13 No 2 Desember 2009 p 111-116.

Ukhaerunisa, Y, *Alat Komunikasi Politik*, 2012. Diakses, 19-10-2013 <http://ukhaerunisa.wordpress.com/2012/05/27/alat-komunikasi-politik/>

....., Diakses, 17-10-2013). <http://badan-bahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/> , *Politik Dinasti Indonesia Dalam Lorong Demokrasi Sistem Kerajaan Keturunan*, Diakses, 27-10-2013. <http://akuindonesia-siana.wordpress.com/2010/05/11/politik-dinasti-indonesia-dalam-lorong-demokrasi-sistem-kerajaan-keturunan/>

....., *Ironi pertumbuhan*, <http://regional.kompas.com/read/2013/10/22/1013262/Kemiskinan.di.Banten.Saat.Rumah.Atut.Tak.Sesuai.Harapan>.

Catatan:

Topik yang sama dari artikel ini pernah dipresentasikan dan masuk dalam pro-siding Seminar (Diskusi) Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan, di Yogyakarta, 7-9 November 2013 atas kerjasama Tiga Instansi, Balai Bahasa Prov. DIY, dengan BPPKI Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun, artikel ini telah mengalami perubahan di banding yang ada di "prosiding".